

Rencana kerja Tahun 2024



Renja

Dinas Perhubungan
Kab. Tanah Laut



Telah
di Revisi



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

PERNYATAAN TELAH DIREVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja). Substansi informasi yang dimuat dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) menjadi tanggung jawab Tim Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) telah berpedoman pada RKPD dan Peraturan terkait dalam penyusunan Rencana Kerja.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Pelaihari, 01 Agustus 2023
Inspektur,


Drs. JOKO WURYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650116 199203 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tanah Laut yang terletak pada ujung Selatan Pulau Kalimantan dimana berbatasan dengan laut pemisah Pulau Jawa dan Kalimantan serta berbatasan pula dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Mengingat semakin berkembangnya usaha pertambangan, pertanian, perkebunan dan peternakan maka sangat berpotensi untuk dikembangkan Pelabuhan Nasional yang dapat mendistribusikan SDA tersebut keluar daerah, luar propinsi maupun luar negeri dengan modal transportasi laut.

Selain itu, Kabupaten Tanah Laut yang juga berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang merupakan sentral ekonomi dan perdagangan di Propinsi Kalsel serta Kabupaten Tanah Laut yang merupakan jalur Trans Kalimantan pesisir selatan – timur maka hal ini menyebabkan arus lalu lintas orang dan barang dengan menggunakan moda transportasi darat untuk mendistribusikan hasil SDA di atas semakin lama akan semakin berkembang.

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka diperlukan suatu rencana Kerja (RENJA) SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan yang mendasari penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun Laut 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat 3;
- c. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat 3;
- d. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- e. Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- f. Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- g. Permendagri nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, agar menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- k. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 050.13/048/Bappeda/2023, tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai alat bantu pada setiap bidang serta unit kerja agar secara konsisten dan konsekuen menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja SKPD ini adalah terselenggaranya program dan kegiatan prioritas sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Renstra SKPD dan RPD Tanah Laut.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renja ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. Penutup

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan.

Dalam rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 telah ditetapkan 3 Program 14 Kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.455.218.457,00 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Dua Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Gaji dan tunjangan ASN sudah dibayarkan selama 1 tahun anggaran. Jumlah pagu anggaran Rp. 5.802.346.407,00 realisasi Rp. 4.995.688.087,00 atau (86%). Sisa anggaran sebesar Rp. 806.658.320,00.

1.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Sub kegiatan ini berisi Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 1.000.000,00 realisasi Rp. 771.400,00 (77%). Sisa anggaran Rp. 228.600,00.



1.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini berisi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik telah direalisasikan sesuai dengan di DPAny.

Jumlah pagu anggaran Rp. 9.999.640,00 realisasi sebesar Rp. 7.951.500,00 (80%). Sisa anggaran Rp. 2.048.140,00.

1.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belanja ATK, belanja modal alat pendingin, personal computer dan belanja modal peralatan personal computer telah di realisasikan sesuai dengan di DPAny.

Jumlah pagu anggaran Rp. 125.632.317,00 realisasi sebesar Rp. 99.480.000,00 (79%). Sisa anggaran Rp. 2.615.2317,00.

1.2.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Belanja cetak dan penggandaan telah direalisasikan sesuai dengan kebutuhan selama 1 tahun anggaran.

Jumlah pagu anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi Rp. 9.992.500,00 (99%). Sisa anggaran Rp. 7.500,00.

1.2.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Langganan Surat Kabar Barito Pos dan Surat Kabar Radar Banjarmasin telah dibayarkan selama 12 bulan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 2.932.800,00 realisasi Rp. 2.250.000,00 (77%). Sisa anggaran Rp. 682.800,00.

1.2.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Sub kegiatan ini digunakan untuk belanja pameran pembangunan / expo dan pameran anggrek.

Jumlah pagu anggaran Rp. 13.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 12.845.000,00 (99%). Sisa anggaran Rp. 155.000,00.



1.2.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini digunakan untuk belanja makan dan minum rapat, makan dan minum jamuan tamu, dan belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota telah dibayarkan semua selama 1 tahun anggaran.

Jumlah pagu anggaran Rp. 270.995.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 261.598.166,00 atau (97%). Sisa anggaran sebesar Rp. 9.396.834,00.

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Belanja tagihan telepon, air, dan listrik telah dibayarkan selama 1 tahun anggaran.

Jumlah pagu anggaran Rp. 108.470.424,00 realisasinya sebesar Rp. 75.035.621,00 (69%). Sisa anggaran sebesar Rp. 33.434.803,00.

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Honorarium Non ASN (Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi lainnya), Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non ASN telah dibayarkan selama 12 bulan. Jumlah pagu anggaran Rp. 1.219.020.000,00 dan terealisasi Rp. 1.122.091.531,00 atau (92%). Sisa anggaran sebesar Rp. 96.928.469,00.

1.4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan telah dilakukan dan dibayarkan sesuai peruntukannya selama 1 tahun anggaran.

Jumlah pagu anggaran Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.889.900,00 (99,6%). Sisa anggaran sebesar Rp. 110.100,00.

- 1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 telah dilakukan dan dibayarkan sesuai peruntukannya selama 1 tahun anggaran. Jumlah pagu anggaran Rp. 357.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 347.720.500,00 (97%). Sisa anggaran sebesar Rp. 9.779.500,00.
- 1.4.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pemeliharaan AC, HT, Komputer, Printer dan Pemeliharaan Jaringan Listrik telah dilakukan dan dibayar selama 1 tahun anggaran. Jumlah pagu anggaran Rp. 49.850.000,00 terealisasi sebesar Rp. 44.016.000,00 (88%). Sisa anggaran sebesar Rp. 5.834.000,00
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
- 2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 2.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, dan belanja perjalanan dinas dalam kota telah dibayarkan sesuai kebutuhan.
- Jumlah pagu anggaran Rp. 34.986.500,00 realisasi Rp. 5.400.000, (15%). Sisa anggaran sebesar Rp. 29.586.500,00.
- 2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 2.2.1 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota.
- Belanja modal perkakas standard (standard tools), belanja modal alat ukur universal, dan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya telah dibayarkan sesuai kebutuhan.
- Jumlah pagu anggaran Rp. 34.882.688,00 dan terealisasi Rp. 32.880.000,00 (94%). Sisa anggaran sebesar Rp. 2.002.688,00.
- 2.2.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.
- Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi, belanja bahan-bahan kimia, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, dan



belanja perjalanan dinas dalam kota telah dibayarkan sesuai kebutuhan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 29.979.554,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.897.100,00 (73%). Sisa anggaran sebesar Rp. 8.082.454,00.

2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

2.3.1 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).

Belanja alat/bahan untuk cetak karcis keperluan UPT Terminal dan Perparkiran sudah direalisasikan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 34.999.800, dan terealisasi sebesar Rp. 31.818.000,00 (91%). Sisa anggaran sebesar Rp. 3.181.800,00

2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

2.4.1 Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja modal bangunan fasilitas umum, dan belanja modal bangunan parkir juga sudah dibayar sesuai keperluannya.

Jumlah pagu anggaran Rp. 692.669.172,00 dan terealisasi sebesar Rp. 683.226.100,00(99%). Sisa anggaran sebesar Rp. 9.443.072,00.

2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Belanja suku cadang-suku cadang lainnya, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, belanja jasa kalibrasi, belanja modal personal computer, belanja modal peralatan personal computer, belanja modal peralatan jaringan, dan belanja modal



software semuanya sudah dibayar sesuai keperluannya hanya belanja bimbingan teknis yang tidak direalisasikan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 175.720.081,00 dan terealisasi sebesar Rp145.324.520,00(83%). Sisa anggaran sebesar Rp. 30.395.561,00

2.5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Secara fisik peralatan uji sudah terpelihara dengan baik sesuai dari standar kemenhub dan lulus kalibrasi. Pembayaran hanya dilakukan jika ada peralatan uji yang rusak/perlu perbaikan saja.

Jumlah pagu anggaran Rp. 157.100.000,00 dan terealisasi Rp. 126.423.795,00 (80%). Sisa anggaran sebesar Rp. 30.676.205,00.

2.6 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor tidak direalisasikan, belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya, dan belanja perjalanan dinas dalam kota telah dibayarkan sesuai kebutuhan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 99.981.753,00 dan terealisasi sebesar Rp. 92.389.500,00 (92%). Sisa anggaran sebesar Rp. 7.592.253,00

2.6.2 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota.

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, belanja jasa tenaga perhubungan, dan belanja perjalanan dinas dalam kota semua sudah dibayarkan sesuai keperluannya.

Jumlah pagu anggaran Rp. 139.667.888,00 realisasi sebesar Rp. 132.424.000,00 (95%). Sisa anggaran sebesar Rp. 7.243.888,00

3. Program Pengelolaan Pelayaran

3.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha

3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, dan belanja perjalanan dinas dalam kota juga sudah direalisasikan dibayar sesuai kebutuhannya.

Jumlah pagu anggaran Rp. 13.519.711,00 realisasi sebesar Rp. 12.155.284,00 (90%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.364.427,00

3.2 Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Jumlah pagu anggaran Rp. 19.914.722,00 realisasi sebesar Rp. 18.046.500 (91%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.868.222,00.

3.3 Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

3.3.1 Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sudah dibayar sesuai kebutuhannya.

Jumlah pagu anggaran Rp. 6.160.000,00 realisasi sebesar Rp. 3.240.000,00 (53%). Sisa anggaran sebesar Rp. 2.920.000,00

3.4 Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

3.4.1 Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau.

Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota direalisasikan sesuai dengan kebutuhan saja.

Jumlah pagu anggaran Rp. 19.890.000,00 realisasi sebesar Rp. 11.280.000,00 (57%). Sisa anggaran sebesar Rp. 8.610.000,00.

Jumlah realisasi keuangan seluruhnya terserap sebesar **88%** sampai dengan bulan Desember 2022.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2022 seperti tampak pada tabel 2.1 di bawah ini :

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.995.746.588		1.694.748.321		1.745.648.358		1.611.611.157		1.952.322.369		7.004.330.205		87,60%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.803.346.407		1.352.648.052		1.184.776.456		1.195.156.967		1.263.878.012		4.996.459.487		86,10%
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayaran Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN (Bulan)	12	5.802.346.407	3	1.352.648.052	3	1.184.005.056	3	1.195.156.967	3	1.263.878.012	12	4.995.688.087	100,00%	86,10%
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan (Dokumen)	32	1.000.000	6	-	6	771.400	6	-	14	-	32	771.400	100,00%	77,14%
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			432.559.757		42.757.019		160.974.500		28.261.712		162.123.935		394.117.166		91,11%
	▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	10	9.999.640	-	-	6	7.951.500	4	-	-	-	-	7.951.500	0,00%	79,52%
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	10	125.632.317	-	500.000	9	85.895.600	1	5.264.400	-	7.820.000	10	99.480.000	100,00%	79,18%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	▪ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan (Lembar)	44411	10.000.000	475	142.500	15.750	5.350.000	11.250	2.400.000	16.936	2.100.000	44.411	9.992.500	100,00%	99,93%
	▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar)	1	2.932.800	-	510.000	1	440.000	-	700.000	-	600.000	-	2.250.000	0,00%	76,72%
	▪ Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	13.000.000	-	-	-	-	-	-	2	12.845.000	2	12.845.000	100,00%	98,81%
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat (Kali)	30	270.995.000	4	41.604.519	2	61.337.400	6	19.897.312	18	138.758.935	30	261.598.166	100,00%	96,53%
		Terlaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah (Kali)	160		33		105		14		27		179		111,88%	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.327.490.424		284.238.650		301.496.002		305.244.778		306.147.722		1.197.127.152		90,18%
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa (Jenis)	3	108.470.424	1	16.848.195	1	17.945.882	1	19.669.300	-	20.572.244	2	75.035.621	75,00%	69,18%
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	1	1.219.020.000	0	267.390.455	0	283.550.120	-	285.575.478	1	285.575.478	2	1.122.091.531	150,00%	92,05%
		Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap Terbayar (Orang/Bulan)	576		138		138		138		162		576		100,00%	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			432.350.000		15.104.600		98.401.400		82.947.700		220.172.700		416.626.400		96,36%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	1	25.000.000	1	1.500.000	-	10.797.700	-	9.345.200	-	3.247.000	-	24.889.900	0,00%	99,56%
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	30	357.500.000	-	9.654.600	29	79.282.700	1	58.453.500	-	200.329.700	-	347.720.500	0,00%	97,26%
	▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	10	49.850.000	2	3.950.000	2	8.321.000	6	15.149.000	-	16.596.000	10	44.016.000	100,00%	88,30%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98,73%	87,60%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			1.399.987.436		44.364.000		80.446.600		126.840.100		1.020.132.315		1.271.783.015		90,84%
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			34.986.500		-		4.500.000		225.000		675.000		5.400.000		15,43%
	▪ Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	34.986.500	-	-	1	4.500.000	1	225.000	-	675.000	2	5.400.000	50,00%	15,43%
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			64.862.242		1.270.000		15.047.100		25.530.000		12.930.000		54.777.100		84,45%
	▪ Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Jalan (Unit)	2	34.882.688	-	-	2	7.350.000	-	25.530.000	-	-	2	32.880.000	100,00%	94,26%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	▪ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	6	29.979.554	-	1.270.000	2	7.697.100	-	-	4	12.930.000	6	21.897.100	100,00%	73,04%
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			34.999.800		-		-		31.818.000		-		31.818.000		90,91%
	▪ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal dan Jumlah Lokasi Parkir (Terminal)	1	34.999.800	-	-	-	-	1	31.818.000	-	-	1	31.818.000	100,00%	90,91%
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			692.669.172		-		-		22.727.100		660.499.000		683.226.100		98,64%
	▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	692.669.172	-	-	-	-	1	22.727.100	-	660.499.000	1	683.226.100	100,00%	98,64%
5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			332.820.081		-		-		12.000.000		259.748.315		271.748.315		81,65%
	▪ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan (Unit)	2500	175.720.081	878	-	884	-	635	12.000.000	427	133.324.520	2.824	145.324.520	112,96%	82,70%
	▪ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prsarana Pengujian Kendaraan Bermotor Terpelihara (Unit)	25	157.100.000	-	-	-	-	12	-	13	126.423.795	25	126.423.795	100,00%	80,47%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			239.649.641		43.094.000		60.899.500		34.540.000		86.280.000		224.813.500		93,81%
	▪ Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	*Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Unit)	95	99.981.753	-	3.845.000	8	10.872.000	-	7.867.500	87	69.805.000	95	92.389.500	100,00%	92,41%
	▪ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan (Kali)	12	139.667.888	2	39.249.000	1	50.027.500	10	26.672.500	-	16.475.000	13	132.424.000	108,33%	94,81%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										101,21%	90,84%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			59.484.433		600.000		24.012.284		8.040.000		12.069.500		44.721.784		75,18%
1	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha			13.519.711		-		11.435.284		720.000		-		12.155.284		89,91%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	13.519.711	-	-	1	11.435.284	-	720.000	-	-	1	12.155.284	100,00%	89,91%
2	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			19.914.722		600.000		10.977.000		2.370.000		4.099.500		18.046.500		90,62%
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang dalam Penyeberangan (Orang)	4600	19.914.722	6.643	600.000	5.573	10.977.000	3.527	2.370.000	-	4.099.500	15.743	18.046.500	342,24%	90,62%
3	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			6.160.000		-		-		2.200.000		1.040.000		3.240.000		52,60%
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diawasi (Pelabuhan)	1	6.160.000	-	-	-	-	-	2.200.000	1	1.040.000	1	3.240.000	100,00%	52,60%



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			19.890.000		-	1.600.000		2.750.000		6.930.000		11.280.000		56,71%	
	▪ Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Sarana Navigasi (Buah)	7	19.890.000	-	-	-	1.600.000	-	2.750.000	7	6.930.000	7	11.280.000	100,00%	56,71%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										181,10%	75,18%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
			9.455.218.457		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										99,61%	88,00%
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut digunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2011 tentang standart pelayanan minimal Bidang perhubungan daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota. Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sesuai aturan tersebut diatas dapat disampaikan melalui Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun			Proyeksi pada Tahun		Analisis
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatkan sarana prasarana Perhubungan	Persentase meningkatnya sarana prasarana perhubungan	100%	Meningkatnya sarana prasarana Transportasi	Persentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	12 %	4,50%	7%	0,75%	1%	12%	4,35%	6,86%	0,73%	1%	
				Meningkatnya persentase sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart	Persentase sarana prasarana LLAJ sesuai standart	13%	2%	6%	1%	2%	11,45%	2%	6%	1%	2%	
				Meningkatnya konektifitas akses jalan pelabuhan Pelayari / Swarangan	Persentase akses jalan pelabuhan pelayari / sawarangan yang dapat terkoneksi dengan jalan arteri primer	20%	20%	20%	20%	20%	48%	20%	32%			
				Meningkatnya sarana bantu navigasi di alur sungai	Persentase peningkatan sarana bantu navigasi di alur sungai sesuai standart	10%	10%	10%	10%	10%	20%	10%	8%	0%	0%	
2.	Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perhubungan	Persentase penerapan inovasi layanan berkelanjutan	100%	Meningkatnya Inovasi Layanan	Jumlah Inovasi Layanan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Meningkatnya indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor perhubungan	Nilai IKM Dinas Perhubungan	78	79	80	81	82	78	79	81,76	82,16	82	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun			Proyeksi pada Tahun		Analisis
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan baik	100%	Meningkatnya tatakelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP SKPD	70	70	75	75	75	66,40	70,29	70,7	-	-	
					Nilai RB SKPD	60	60	65	70	70	48,39	74,88	81,40	-	-	
					Nilai ZI SKPD	60	60	65	70	70	-	-	60,25	-	-	
4	Meningkatkan kertetiban lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai dan penyeberangan yang berkeselamatan	Persentase lalu lintas di kabupaten tanah laut lancar	100%	Meningkatnya kertetiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan	Persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas	15%	15%	15%	15%	15%	10%	5,9%	71,41%	33,12%	15%	
					Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 10 ribu Keberangkatan	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,0048	0,0038	0,0084	0,0087	0,055	
				Meningkatnya Konektivitas angkutan di kabupaten tanah laut	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	0,22	0,22	0,33	0,44	0,5	0,22	0,22	0,33	0,93	0,5	
				Meningkatnya pembinaan angkutan sungai dan penyeberangan	Persentase pembinaan angkutan sungai dan penyeberangan pada dermaga penyeberangan	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	15%	0%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan - permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. Belum optimalnya aksesibilitas jaringan transportasi dalam trayek Kabupaten Tanah Laut.
2. Perkembangan transportasi berbasis air belum dapat dipenuhi sesuai apa yang diharapkan.
3. Kemampuan teknis, kemampuan manajerial dan kemampuan sikap SDM Perhubungan perlu ditingkatkan.
4. Belum aktualnya system informasi, teknologi dan prosedur pelayanan.
5. Belum optimalnya potensi dan sinergitas jejaring sumber daya.
6. Belum terwujudnya penataan manajemen, pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan standarisasi.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD agar selalu dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka terdapat beberapa isu penting yang harus diperhatikan yang dapat terbagi menjadi isu teknis dan isu non teknis.

Isu Teknis yang harus diperhatikan antara lain :

- Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsi SKPD
- Waktu dan jadwal
Yaitu waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Dengan memperhatikan waktu tersebut, maka dapat direncanakan jadwal untuk pelaksanaan pekerjaan agar tercapai dengan sesuai target.
- Regulasi Hukum
Regulasi hukum yang merupakan dasar dari pelaksanaan semua tugas dan fungsi SKPD merupakan salah satu hal yang penting sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD tidak berjalan secara asal dan sembarangan.

Masalah Non Teknis yang dihadapi antara lain adalah :

- Faktor Alam

Faktor alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang disebabkan antara lain karena musim hujan dan lain-lain. Musim hujan yang tidak dapat ditebak menyebabkan jadwal pelaksanaan kegiatan terganggu.

- Faktor Sosial Masyarakat

Terdapat faktor sosial yakni Keadaan masyarakat yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Kondisi yang sedang terjadi di masyarakat harus diperhatikan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari instansi terkait yang langsung ditujukan kepada SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut juga harus merujuk pada Renstra kementerian perhubungan untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pembangunan perhubungan nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa keseluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan transportasi dalam kurun waktu 2020-2024 adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas keseluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden RI adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERDASATRKAN GOTONG ROYONG.”

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas manusia indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam mendukung visi dan misi Presiden RI, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional **Prioritas Nasional 5** yaitu **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar.**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024 tersebut Kementerian Perhubungan merumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu :

1. Terwujudnya konektivitas nasional;
2. Meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan;
3. Meningkatnya level keselamatan dan keamanan perhubungan.

Dari telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mempunyai Visi sebagai berikut :

TERWUJUDNYA TRANSPORTASI TANAH LAUT YANG MANTEB

(Memadai, Aman, Nyaman, Terjangkau, Edukatif dan Berkeselamatan)

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Perhubungan melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Terbukanya jaringan transportasi laut yang memenuhi standar nasional dan internasional
2. Terwujudnya sistem transportasi yang aman, nyaman, tertib dan terkendali
3. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
4. Meningkatkan disiplin aparatur, dan sumber daya manusia (SDM) perhubungan sesuai kompetensi dan kualifikasinya
5. Mengoptimalkan kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan RENSTRA 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan :

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah.

3.2.2. Sasaran :

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas;
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Dishub Kabupaten Tanah Laut selama 3 (tiga) tahun ke depan seperti tampak pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi	Proyeksi	2024	2025	2026
				2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas		Indeks infrastruktur	43,64	47,11	47,91	54,21	60,49
		Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas	Indeks infrastruktur perhubungan	36,55	36,66	26,9	33,49	40,11
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah		Nilai Sakip Kabupaten	B	69,00	70,01	75,00	80,01
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan	Nilai Sakip Dinas Perhubungan	72,80	73,00	75,00	78,00	80,01

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, dalam peningkatan ekonomi masyarakat secara merata dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas;
- Terwujudnya konektivitas kabupaten/kota;
- Membangun sistem angkutan umum masal berbasis jalan dengan menyiapkan Bus Angkutan Feeder dari Halte BRT Bati-bati ke Pelabuhan;
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Untuk mencapai sasaran RPD tahun 2024-2026 yang sekaligus menjadi tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menggunakan 3 program 18 kegiatan, dan 40 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. **29.000.763.347,00.**

c. Tabel rencana program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan yang digunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025, adalah seperti tampak pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	SEKRETARIAT :									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM sekretariat Dishub	82					83	
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	4.906.828				100%	5.000.000
2.15.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.499.888	APBD II		belanja atk, penjilitan, (dokumen)	7 Dokumen	2.500.000
2.15.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.406.940	APBD II		belanja atk, penjilitan, (dokumen)	6 Laporan	2.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kpermendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.492.964.435				100%	6.368.553.606
2.15.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/ bulan	5.492.464.435	APBD II		belanja gaji dan tpp	36 orang/ bulan	6.366.053.606
2.15.01.2.02.0003	Sub Kegiatan PelakSanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	500.000	APBD II		jasa transaksi keuangan	5 Dokumen	2.500.000
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	484.638.426				100%	408.404.462
2.15.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	7.999.860	APBD II		pembelian bolam lampu, kabel, saklar, stop kontak	6 paket	8.004.462
2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	99.238.774	APBD II		belanja ATK, Laptop, PC, printer	8 paket	105.000.000
2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	9.999.792	APBD II		Fotocopy	1 paket	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kpermendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.400.000	APBD II		rek, belanja koran	1 dokumen	2.400.000
2.15.01.2.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	SKPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	15.000.000	APBD II		belanja material pameran	2 paket	13.000.000
2.15.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	350.000.000	APBD II		belanja makmin, perjadin	190 Laporan	270.000.000
2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.215.663.880				0%	-
2.15.01.2.07.0002	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	2.215.663.880	APBD II		2 unit bus dan 1 luxio	0	-
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.266.742.239				100%	1.307.758.584
2.15.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	91.738.175	APBD II		Belanja Rekening Listrik dan Air	12 Laporan	91.738.174

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kpermendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.175.004.064	APBD II		Belanja Gaji PTT	12 Laporan	1.216.020.410
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	463.879.818				100%	432.000.000
2.15.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	34.380.000	APBD II		belanja pemeliharaan mobil jabatan	1 unit	30.000.000
2.15.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	260.000.000	APBD II		belanja pemeliharaan mobil operasional	Unit	230.000.000
2.15.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	19.900.000	APBD II		pemeliharaan, AC, printer, komputer, HT	50 unit	22.000.000
2.15.01.2.09.0009	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	149.599.818	APBD II		rehab. WC, dan ruangan pront opice	1 unit	150.000.000
JUMLAH					10.928.795.626					8.521.716.652

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BIDANG-BIDANG :									
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Indeks Kelancaran Lalulintas	0,25					0,35	
			2. Persentase prasaranan perhubungan	33,6%					33,3%	
2.15.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Tanah Laut	100%	130.000.000				100%	100.000.000
2.15.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	130.000.000	APBD II		belanja Reviu dok. RIJJ	1 Dokumen	100.000.000
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		Persentase ketersediaan perlengkapan janlan di jalan kabupaten Tanah Laut	31,80%	15.465.815.676				31,80%	835.000.000
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia :	327 unit	15.401.815.679	APBD II		belanja, rambu, warning light, cermin cembung, RPPJ , APJ	327 unit	715.000.000
2.15.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Tanah Laut	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 unit	63.999.997	APBD II		pemeliharaan rambu-rambu jalan, APJ	100 unit	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kpermendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		Persentase ruas jalan kabupaten yang dilakukan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	22,11%	376.899.834				24,74%	410.374.880
2.15.02.2.06.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	240.550.000	APBD II		belanja, kegiatan razia, honor tim, perjadin,	12 Laporan	250.000.000
2.15.02.2.06.05	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.06.0015	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	9.384.880	APBD II		belanja makmin rapat	6 Laporan	10.374.880
2.15.02.2.06.01	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.06.0017	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	126.964.954	APBD II		belanja perjadin, makmin, survey	12 Laporan	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kpermendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan	30%	83.290.970				32%	112.000.000
2.15.02.2.07.0003	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15 Laporan	24.930.970	APBD II		Perjalanan dinas dalam daerah	15 Laporan	40.000.000
2.15.02.2.07.02	Sub kegiatan peningkatan kapasitas penilai andalalin	Kab. Tanah Laut	Jumlah Penilai Andalalin yang ditingkatkan kapasitasnya							
2.15.02.2.07.0005	Sub kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Kab. Tanah Laut	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2 Orang	40.000.000	APBD II		Biaya kepesertaan diklat andalalin	2 Orang	40.000.000
2.15.02.2.07.04	Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi							
2.15.02.2.07.0006	Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kab. Tanah Laut	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	6 Laporan	18.360.000	APBD II		Perjadin, honor tim, makmin	8 Laporan	32.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kpermendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah angkutan umum untuk angkutan orang yang tersedia	6 unit	650.945.000				6 unit	900.000.000
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bati - bati, Pelaihari, dan Kec. Bajuin	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 unit	650.945.000	APBD II		belanja operasional pemeliharaan, BBM, perjadiin (langkar dan lakatan)	6 unit	900.000.000
JUMLAH					16.706.951.480					2.357.374.880
UPT. PELABUHAN DAN PENYEBERANGAN										
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM sekretariat Dishub	82					83	
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	18.518.269				100%	25.000.000
2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Panyipatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	13542794	APBD II		ATK dan PC	1 paket	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kpermendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Panyipatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4975475	APBD II		belanja potocopy, jilid	1 paket	10.000.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten	100%					100	
2.15.03.2.07	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	29.916.000				100%	30.000.000
2.15.03.2.07.0004	Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Panyipatan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	29.916.000	APBD II		Perjadin, BBM	1 Laporan	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.03.2.13	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	100.000.000				100%	1.124.036.088
2.15.03.2.13.0006	Sub kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kec. Panyipatan	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang dibangun	1 unit	100.000.000	APBD II		Dokumen FS (kajian teknis)	1 unit	1.124.036.088
JUMLAH					148.434.269					1.179.036.088
UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR										
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM sekretariat Dishub	82					83	
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	24.999.546				100%	25.000.000
2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pelaihari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.999.892	APBD II		belanja ATK	1 paket	15.000.000
2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pelaihari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	9.999.654	APBD II		Cetak blanko	1 paket	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kpermendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Indeks Kelancaran Lalulintas	0,25					0,3	
			2. Persentase prasaranaan perhubungan	11%					11%	
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani	50%	345.000.000				53%	1.195.000.000
2.15.02.2.05.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kec. Pelaihari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	150.000.000	APBD II		dokumen DED	1 unit	1.000.000.000
2.15.02.2.05.0004	Sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Kec. Pelaihari	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1800 Dokumen	45.000.000	APBD II		Pengadaan kartu lulus uji	1800 Dokumen	45.000.000
2.15.02.2.05.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kec. Pelaihari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 unit	150.000.000	APBD II		Pemeliharaan kalibrasi alat uji, (uji rem, uji gas buang, dll)	12 unit	150.000.000
JUMLAH					369.999.546					1.220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	UPT. TERMINAL DAN PERPARKIRAN									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM sekretariat Dishub	82					83	
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	84.981.143				100%	85.000.000
2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pelaihari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.995.492	APBD II		ATK dan Laptop	1 paket	15.000.000
2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pelaihari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	69.985.651			Belanja cetak karcis	1 paket	70.000.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Indeks Kelancaran Lalulintas	0,25					0,3	
			2. Persentase prasarana perhubungan	33,3%					33,3%	
2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar	50%	761.601.283				25%	525.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kec. Pelabuhan	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	4 unit	736.604.352	APBD II		pengaspalan, (toilet + mushola), Pagar ruang laktasi	2 unit	500.000.000
2.15.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kec. Pelabuhan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	1 unit	24.996.931	APBD II		pemeliharaan ringan fasilitas terminal yg sdh terbangun (sesuaikan Pagu)	1 unit	25.000.000
2.15.02.2.04	Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	33,3%	-				33,3%	250.000.000
2.15.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		APBD II		makmin, perjadin, honor tim (OK), pemasangan paving blok pasar hewan	12 Laporan	250.000.000
JUMLAH					846.582.426					860.000.000
TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN					29.000.763.347					14.138.127.620

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai panduan dan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan / program/ kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Renja-Perubahan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ini didasarkan pada :

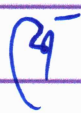
1. Kondisi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
2. Semua unit kerja yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
3. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Laut.
4. Arahkan dari pimpinan instansi (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut)
5. Berprinsip Dinamis yaitu siap mengikuti perubahan baik internal maupun eksternal.

Pelaihari, Juli 2023,
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut,

Danoe Sulaiman, SH

NIP. 19801125 200212 1 003



JABATAN	PARAF
Sekretaris Dinas	
Kasubbag Perencanaan & Keuangan	

LAMPIRAN



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

SK Tim Penyusun RENJA 2024



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512)-21035 Fax.(0512)-
21035

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 550/ 05 / I/SEKR / DISHUB

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tentang pembentukan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/048/Bappeda/2023, tanggal 13 Januari 2023, tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPDTahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas:

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Tanah Laut;

7. Melaksanakan Penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu,
10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Tanah Laut,



Gentry Yudiantono, SE
NIP. 19660708 199303 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Nomor : 550/ 05 / I /SEKR/Dishub
Tanggal : 16 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Gentry Yuliantono, SE NIP. 19660708 199303 1 002	Kepala Dinas	Ketua
2.	Tedy Mulyana, ST,MT NIP. 19800617 200501 1 007	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	Danoe Sulaiman, Amd LLASDP, SH NIP. 19801125 200212 1 003	Kepala Bidang Lalu Lintas & Angkutan	Koordinator
4.	Supiansyah, S.Kom NIP. 19790508 200604 1 019	Plt.Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan	Anggota
5.	Daryono, A.Md NIP. 19780405 200501 1 011	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Anggota
6.	Hj. Harni Rahayu, Si.Kom NIP. 19800810 200801 2 040	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Andri Triyanto C, LLASDP NIP. 19821213 200312 1 004	Seksi Lalu Lintas	Anggota
8.	Rahmat Hidayat, A,Md NIP. 19790512 200801 1 016	Seksi angkutan	Anggota
9.	Suriadi Habiyani,S.I.Kom NIP. 19780417 200901 1 001	Seksi Prasarana	Anggota
10	Supiansyah, S.Kom NIP. 19790508 200604 1 019	Seksi Keselamatan dan Pengembangan	Anggota
11	Prawono,S.Sos NIP. 19660408 199103 1 010	Kepala UPT PKB	Anggota

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
12	Riswan Akbar NIP. 19820501 200701 1 007	Kepala UPT Terminal	Anggota
14	Abdurahman Sidik , S.I,Kom NIP. 19790315 200801 1 017	Kepala UPT Pelabuhan	Anggota
15	Novan Andidyan, S.Tr NIP. 19830210 201001 1 001	Kasubag TU UPT PKB	Anggota
16	Pidi Mashudi Jamil, A.Md NIP. 19790521 201101 1 001	Kasubag TU UPT Pelabuhan	Anggota

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut,



Genthy Yulianto, SE
NIP. 19660708 199303 1 002

Laporan Hasil Revie Renja 2024



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 01 Agustus 2023

Nomor : 700.1.2.1/237/LHR-Renja/Insp/2023

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Perihal : Laporan Hasil Reviu Rancangan
Akhir Rencana Kerja (Renja)
TA. 2024

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut

di -

Pelaihari

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap perundang-undangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan serta menjamin kualitas Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, perlu dilaksanakan Reviu terhadap Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan Reviu terhadap Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Anggaran Daerah Tahunan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ tanggal 3 Juni 2022 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023 dan sesuai dengan Surat dari Sekretaris Daerah Tanah Laut Nomor: 000.7.3/1880/Perenc. Makro/2023 tanggal 18 Juli 2023 Perihal Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah TA. 2024 serta Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/320/Insp/2023 tanggal 24 Juli 2023 untuk melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ tanggal 3 Juni 2022 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
13. Surat dari Sekretaris Daerah Tanah Laut Nomor: 000.7.3/1880/Perenc. Makro/2023 tanggal 18 Juli 2023 Perihal Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah TA. 2024;
14. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Nomor 550/299/Dishub/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Permohonan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2024;

15. Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 Nomor 800.1.11.1/320/2023 tanggal 24 Juli 2023.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dilaksanakannya Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman pada RKPD dan Peraturan terkait dalam penyusunan Rencana Kerja.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 yang mencakup pengujian terbatas atas dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit yang terdiri dari:

- a) Kelengkapan dokumen;
- b) Kesesuaian rumusan sasaran dalam Bab III Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2024;
- c) Tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan pada Bab III Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- d) Kinerja Kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

V. METODOLOGI REVIU

Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan melakukan Penelaahan kesesuaian dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2024.

VI. GAMBARAN UMUM

Renja adalah dokumen yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang berkesinambungan untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja memuat:

1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
2. Tujuan dan Sasaran perangkat daerah;
3. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024.

VII. URAIAN HASIL REVIU

Hasil dari pelaksanaan reviu atas Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dituangkan pada **Catatan Hasil Reviu (CHR terlampir)**.

VIII. APRESIASI

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menyampaikan terimakasih atas kerjasama dari seluruh Tim yang tergabung dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sehingga dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.



Inspektur,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650116 199203 1 008

**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Disusun oleh/ Tanggal	Slamet Mujiono, S.STP 28 Juli 2023
	Diteliti dan disetujui oleh/ Tanggal	Hj. Riva Mahrani, ST 31 Juli 2023
Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2024		

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/320/2023 tanggal 24 Juli 2023 untuk melaksanakan reviu atas rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu terhadap rancangan akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024.

A. Data Umum

Sesuai dengan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024:

1. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024

Berdasarkan Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

- 1.1 Tujuan **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas”** dengan sasaran **”Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas.”**
- 1.2 Tujuan **“Meningkatkan akuntabilitas kinerja internal Pemerintah Daerah”** dengan sasaran **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.”**

2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material;
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya;
- 4) Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang;
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang).

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (4)

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota.

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

6. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota;
- 2) Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
- 3) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

7. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
- 2) Sub kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin;
- 3) Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin.

8. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

c) Program Pengelolaan Pelayaran

1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

1) Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

2. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

1) Sub kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau.

B. Catatan Hasil Reviu

1) Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 telah sesuai dengan sasaran dalam RKPD Tahun 2024.

2) Kesesuaian Pencantuman Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang RKPD Tahun 2024

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa **terdapat ketidaksesuaian** antara target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dengan target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dalam Renja Tahun 2024	Target Kinerja Dalam RKPD Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasaranan perhubungan	33.4%	33,6%
2.	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan	30%	100%
3.	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani	51%	50%

1	2	3	4	5
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	12 paket
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	2 paket

3) Kesesuaian Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tujuan dan sasaran, program dan kegiatan dalam BAB III rancangan akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 telah didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana disebutkan dalam BAB II rancangan akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024.

4) Kesesuaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam Mendukung Kinerja Program Dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

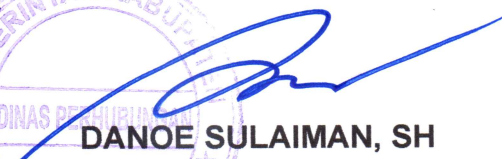
Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan dalam rancangan akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 telah sesuai dengan kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026.

C. Rekomendasi

Sehubungan dengan hasil reviu di atas, kami memberikan rekomendasi kepada kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk menyesuaikan target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 dengan target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2024.

Pelaihari, 31 Juli 2023

Kepala Dinas Perhubungan,


DANOE SULAIMAN, SH
 NIP.19801125 200212 1 003

Inspektur Pembantu I,


Hj. RIVA MAHRANI, ST
 NIP.19770223 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

PERNYATAAN TELAH DIREVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja). Substansi informasi yang dimuat dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) menjadi tanggung jawab Tim Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) telah berpedoman pada RKPD dan Peraturan terkait dalam penyusunan Rencana Kerja.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Pelaihari, 01 Agustus 2023
Inspektur,


Drs. JOKO WURYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650116 199203 1 008